

Judul : DPR Minta Menteri Nadiem Ikut Atasi Krisis Pertanian
Tanggal : Jumat, 08 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Generasi Muda Ogah Turun Ke Sawah

DPR Minta Menteri Nadiem Ikut Atasi Krisis Pertanian

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 97,7 triliun untuk 2024. Anggaran besar ini diharapkan dapat dimaksimalkan untuk menuntaskan masalah bangsa saat ini.

ANGGOTA Komisi X DPR Putra Nababan mengatakan, salah satu persoalan bangsa, yakni kemarau panjang akibat El Nino ini telah memukul banyak masyarakat di berbagai daerah. Pihaknya mendorong lembaga-lembaga pendidikan ikut berperan dalam memberikan terobosan mengatasi dampak kemarau panjang ini.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, saat ini negara sedang mengalami krisis regenerasi petani muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 61 persen petani saat ini berusia di atas 45 tahun. Banyak anak muda ogah jadi petani karena dianggap tidak mencerahkan.

"Nggak keren jadi petani. Padahal regenerasi penerus ini jadi kunci keberhasilan sektor pertanian," tegas Putra dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Mendikbudristek Nadiem

Makarim di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Untuk itu, dia meminta Kemendikbudristek ikut terlibat mengatasi krisis petani ini. Sebab, krisis petani ini juga terkait dengan kemanusiaan.

"Saya meminta Ditjen Dikti dan Ditjen Vokasi, harus dapat memberikan manfaatnya untuk kemanusiaan. Sebab, ilmu hanya akan menjadi ilmu jika bermanfaat bagi kemanusiaan," pintanya.

Putra bilang, fraksinya (PDIP) setuju dengan alokasi anggaran Kemendikbudristek di tahun 2024 sebesar Rp 97,7 triliun.

"Kami setuju, tapi saya titip kemanusiaan itu yang diutamakan. Kami tidak mau melihat ada SMK Pertanian yang *hopeless* atau SMK Pertanian nggak ada kerjanya, *output* dan *outcome*-nya nggak jelas," wantinya.

Putra juga meminta agar Men-

teri Nadiem memperhatikan 500 guru di daerah pemilihannya. DKI Jakarta, yang sudah dua tahun ini sama sekali tidak memiliki penghasilan lantaran belum diangkat. Mereka adalah guru swasta yang diberhentikan sebagai guru oleh yayasan tempatnya mengajar setelah dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) prioritas pertama tahun 2021.

"Saya meminta mas Menteri mendesak Pejabat Gubernur DKI yang mantan Kepala Sekretariat Presiden, agar 500 guru ini mendapatkan penempatan," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti menambahkan, pagu sementara Kemendikbudristek tahun anggaran 2024 sebesar Rp 97,7 triliun.

Pagu tersebut dibagi berdasarkan program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan wajib belajar 12 tahun sebesar Rp 13,99 triliun. Kualitas pengajaran dan pembelajaran Rp 15,8 triliun. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Rp 3,06 triliun. Pendidikan tinggi Rp 38,57 triliun. Pendidikan dan pelatihan vokasi

Rp 6,01 triliun. Dan dukungan manajemen Rp 20,24 triliun.

Sementara, berdasar per unit eselon I, yakni, Sekretaris Jenderal Rp 42,43 triliun. Inspektoral Jenderal Rp 203 miliar. Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Rp 2,78 triliun. Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Rp 1,09 triliun.

Berikutnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rp 1 triliun. Ditjen Kebudayaan Rp 3,29 triliun. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Rp 5,04 triliun. Ditjen Dikti, Riset dan Teknologi Rp 33,31 triliun. Ditjen Pendidikan Vokasi Rp 8,55 triliun.

"Total pagu indikatif Kemendikbudristek tahun anggaran 2024 adalah Rp 97,7 triliun," ujarnya. Di tempat yang sama, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2024. Antara lain, peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

"Tentunya masukan Komisi X DPR mengenai berbagai macam akselerasi dan sosialisasi terhadap Program Indonesia

Pintar (PIP) menjadi fokus kita ke depan. Dan juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) juga tentunya," jelasnya.

Berikutnya, program kualitas pembelajaran dan pengajaran. Dia memastikan, program prioritas ini merupakan kesempatan untuk mengakselerasi semua program guru penggerak, sekolah penggerak. Dan juga memastikan hampir 100 persen sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka.

Nadiem memastikan, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan menjadi fokus dari anggaran Kemendikbudristek tahun depan.

Pihaknya pun sudah melakukan sosialisasi untuk ekspansi yang besar-besaran pada program MBKM dan menyiapkan berbagai macam dana untuk perguruan tinggi dalam melaksanakan kemitraan dengan industri.

"Berbagai aspek dalam riset juga akan kami dukung dan juga peningkatan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi," katanya. ■ KAL